

## **Pengaruh Kebijakan Pemko Medan Terhadap Masyarakat di Medan Johor (Studi Kasus Median Jalan Karya Wisata Medan Johor)**

**Ghufran Azmi Pradana<sup>1</sup>, Junaidi<sup>2</sup>, Farhan Indra<sup>3</sup>, Muhammad Ichsan<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; ghufranazmi@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; junaidi@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; farhanindra@gmail.com

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; muhammadichsani@gmail.com

Received: 04/07/2023

Revised: 19/07/2023

Accepted: 29/07/2023

### **Abstract**

This journal discusses the influence of municipal government policies on the community in Medan Johor (case study of the median of the Medan Johor tourist work road). This research aims to determine the Medan city government's policy regarding the installation of road medians and the pros and cons of the Medan Johor community regarding road media. This research uses a qualitative type of research and uses a political economy approach and in this research data collection techniques are obtained by interviews and documentation with sources. The results of this research show that the installation of a road median makes traffic on the Medan Johor tourism road run smoothly. Now the traffic, although the volume is busy, is flowing smoothly. According to Agus, one of the residents who lives on the Karya Wisata road, the median of the road on the Karya Wisata Karya Wisata road is indeed not a pooler policy. However, as the leader of Medan's mayor, he has the courage to make decisions for the benefit of the general public.

### **Keywords**

Policy; City Government; Society

### **Corresponding Author**

Ghufran Azmi Pradana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; ghufranazmi@gmail.com

## **1. PENDAHULUAN**

Definisi Masyarakat sudah banyak dikemukakan oleh para ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang wilayah itu dan memiliki budaya yang relatif sama. Adapun ahli lain mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya yang sama (Ishak & Ramadhan, 2019).

Kecamatan adalah satu organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah dengan pemekaran kecamatan dengan melihat kenyataan bahwa pelaksanaannya berpengaruh baik atau buruk terhadap peningkatan pelayanan. Fungsi utama pemerintah daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan Masyarakat (Nasyaa & Nurhayati, 2022). Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah termasuk aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan



pelayanan optimal kepada masyarakat dan Johor merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kota Medan. Menurut pusat badan statistik pada tahun 2014 secara geografis, Kecamatan Medan Johor berbatasan dengan Kecamatan Medan Polonia di sebelah utara, Kabupaten Deli Serdang di sebelah selatan, Kecamatan Medan Amplas di sebelah timur, dan berbatasan dengan Kecamatan Medan Tuntungan di sebelah barat (Ardiyanti & Zulian, 2018).

Median jalan merupakan bagian dari jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan dengan bentuk memanjang sejajar jalan, terletak di sumbu/tengah jalan dimaksudkan untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. (Pedoman Perencanaan Putaran Balik No. 06/BM/2005). Median jalan selain berfungsi memisahkan dua aliran lalu lintas yang berlawanan arah, juga mencegah kendaraan belok kanan, menjadi tempat menunggu bagi pejalan kaki yang akan menyeberang, untuk mengurangi silau dari sinar lampu kendaraan dari arah yang berlawanan, sebagai tempat fasilitas pendukung jalan, menjadi cadangan lajur (jika cukup luas), tempat prasarana kerja sementara, dan bisa dimanfaatkan sebagai jalur hijau. Median Jalan dibuat dengan kriteria: jalan bertipe minimal empat lajur dua arah (4/2 UD), volume lalu lintas dan angka kecelakaan tinggi, diperlukan untuk tempat fasilitas pendukung lalu lintas (Ahmad, 2022).

## 2. METODE

Penelitian yang dipakai dalam pembuatan tulisan ini membutuhkan data-data yang akurat, bersifat fakta dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Namun, pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Etnografi. Menurut Creswell, penelitian etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dan periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Pengumpulan yang terjadi di lapangan dengan berhubungan langsung dengan subjek penelitian dengan adanya dokumentasi sebagai bukti pendukung (Bungin, 2015).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pemko Medan Dalam Pemasangan Median di Jalan Karya Wisata

Pengaruh kebijakan adalah efek atau dampak yang timbul akibat penerapan suatu kebijakan, baik oleh pemerintah, organisasi, maupun individu, terhadap berbagai aspek dalam masyarakat atau lingkungan tertentu. Pengaruh kebijakan bisa bersifat positif, seperti meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, atau meningkatkan kualitas lingkungan. Namun, pengaruh kebijakan juga bisa bersifat negatif, seperti mengakibatkan ketidaksetaraan, merugikan lingkungan, atau menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, perencanaan dan evaluasi kebijakan yang baik sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari kebijakan tersebut (Matondang et al., 2024).

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah (Dalimunthe & Mardiansyah, 2021). Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Sihaloho, 2022).

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (Suhendra & Ginting, 2018).

Dalam melihat penyebab dari permasalahan lalu lintas, kita tidak terlepas dari infrastruktur yang tersedia. Salah satu infrastruktur yang utama adalah jalan. Peranan utama jalan adalah sebagai prasarana lalu-lintas atau angkutan, dalam mendukung terciptanya arus barang, jasa, serta aktivitas manusia yang lancar (Harris et al., 2021). Namun realita di perkotaan adalah ketimpangan antara tingkat pembangunan jalan dengan pertumbuhan kendaraan yang mana pembangunan jalan tidak berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan kendaraan, melihat realita yang terjadi dapat disimpulkan bahwa potensi muatan yang berlebihan pada jalan, yang pada ujungnya mengakibatkan terjadi kemacetan lalu-lintas, terganggunya kenyamanan pengguna jalan, pemborosan waktu dan materi. Dengan kondisi tersebut sangat mungkin mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas (Rahma & Sihombing, 2023).

Seiring pertumbuhan yang pesat di wilayah perkotaan sehingga tidak dapat kita hindari bahwa banyak masalah sosial yang terjadi salah satu yang adalah masalah dibidang transportasi dan lalu lintas. Pertumbuhan kendaraan berupa roda 2 dan kendaraan roda 4 mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahun di wilayah perkotaan (Rambe et al., 2023). Akan tetapi, hal tersebut belum dapat diimbangi dengan pelebaran atau penambahan jalan atau kapasitas jalan yang maksimal. Untuk dapat mengurangi permasalahan pergerakan lalu lintas dan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan maka dapat direncanakan dengan pembuatan median jalan yang sesuai dengan aturan dan perencanaan yang tepat (Handayani, 2023).

Inilah yang menjadi alasan Wali Kota Medan Bobby Nasution membuat kebijakan pembatas jalan (median/separator) di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor yang dilakukan Pemko Medan melalui OPD terkait bertujuan untuk menertibkan lalu lintas di kawasan tersebut. Sebab, banyak aktivitas masyarakat di seputaran wilayah tersebut yang juga memakan badan jalan sehingga menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas. Penjelasan ini disampaikan menantu Presiden Joko Widodo ini untuk menjawab terkait ramainya informasi di media sosial mengenai kemacetan yang terjadi di kawasan Jalan Karya Wisata, saat menghadiri gelaran Beranda Kreatif (Bekraf) di halaman depan Balai Kota Medan (Hidayat, 2015).

Pemasangan median jalan kini membuat lalulintas di Jalan Karya Wisata Medan Johor jadi lancar. Elemen masyarakat pun mengapresiasi kebijakan yang diambil Walikota Medan Bobby Nasution tersebut. Kami berterima kasih kepada Walikota Medan yang telah mengambil kebijakan pemasangan median jalan di Karya Wisata. Kini lalulintas meskipun volumenya ramai tetapi menjadi lancar," Menurut Agus, median jalan di Karya Wisata memang bukan kebijakan populer. Namun sebagai pemimpin, Walikota Medan berani mengambil keputusan demi kemaslahatan yang bisa dirasakan masyarakat umum.

### **Pro & Kontra Masyarakat Medan Johor Tentang Kebijakan Pemko Medan Terhadap Median Jalan**

Kebijakan Pemko Medan dalam melaksanakan pemasangan median jalan menuai protes warga yang menimbulkan pro dan kontra terhadap Masyarakat Medan Johor karena keberadaan median jalan justru membuat jalanan menjadi tambah macet dan merugikan warga. Pembangunan median sepanjang Jalan Karya Wisata bertentangan dengan Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana

Wilayah Republik Indonesia. Keputusan itu tertuang dalam SK Nomor 260/KPTS/M tahun 2004 Tentang Pengesahan 38, Rancangan SNI dan 64, Pedoman Teknis Bidang Konstruksi dan Bangunan telah mengatur mengenai jarak minimum antara bukaan median untuk jalan kolektor dalam kota adalah 0,3 Km (Silaban et al., 2023).

### **Masyarakat yang Pro**

Menurut beberapa pendapat/informan yang saya wawancarai pada Masyarakat Medan Johor yang pro terhadap kebijakan Pemko ada 5 orang yaitu bernama Ahmad Jerico, Wahyu Syahputra, Rizka Nabila, mereka berpendapat bahwa kebijakan Pemko Medan ada baiknya karena mengurangi kemacetan pada simpang jalan karya kasih pada jam pergi dan pulang kantor. Pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan juga menjadi salah satu faktor terjadinya kemacetan. Banyaknya masyarakat yang berhenti untuk membeli serta parkir sembarangan sampai memakan bahu jalan sehingga mengganggu pengendara lainnya. Sebelum adanya pemasangan median jalan mereka merasakan semrawutnya arus lalu lintas disimpang jalan tersebut.

Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengenai median jalan telah menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat di kawasan Medan Johor. Sebagian warga merasa bahwa kebijakan ini memiliki banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan keamanan lalu lintas. Median jalan berfungsi sebagai pemisah jalur yang dapat mengurangi risiko tabrakan frontal dan membantu mengatur lalu lintas dengan lebih baik. Selain itu, median jalan yang dilengkapi dengan pembatas dan penghalang berpotensi mengurangi kecepatan kendaraan, sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan.

Tidak hanya dari segi keamanan, keberadaan median jalan juga berkontribusi terhadap keteraturan dan estetika kota. Adanya ruang hijau atau dekorasi di median jalan dapat memperindah tampilan jalan dan membuat kota terlihat lebih rapi dan tertata. Hal ini disambut baik oleh warga yang mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan menarik. Keteraturan ini juga diharapkan dapat menciptakan suasana kota yang lebih teratur dan tertib (Siregar et al., 2017).

Namun, tidak semua warga merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Sebagian mengeluhkan bahwa median jalan justru memperparah kemacetan, terutama di titik-titik putar balik yang terbatas. Kendaraan harus menempuh jarak lebih jauh untuk berputar arah, sehingga waktu tempuh menjadi lebih lama dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama di jam-jam sibuk di mana arus lalu lintas sangat padat (Purba et al., 2022).

Selain masalah kemacetan, akses yang terbatas juga menjadi keluhan utama masyarakat. Median jalan sering kali membatasi akses masuk dan keluar dari berbagai tempat usaha, perumahan, dan fasilitas umum. Kondisi ini menyulitkan warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama bagi mereka yang harus sering bepergian atau mengunjungi lokasi-lokasi tertentu. Akibatnya, ada yang merasa bahwa kebijakan ini lebih banyak menimbulkan ketidaknyamanan daripada manfaat (Izharsyah, 2020).

Di sisi lain, beberapa warga mempertanyakan biaya pembuatan dan pemeliharaan median jalan. Mereka berpendapat bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan infrastruktur lain yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan yang rusak atau pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, penting bagi Pemko Medan untuk terus berdialog dengan masyarakat serta melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan berdasarkan umpan balik yang diterima. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif, diharapkan kebijakan ini dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi seluruh warga Medan Johor.

#### 4. KESIMPULAN

Kebijakan median jalan oleh Pemko Medan memang memiliki kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat Medan Johor. Peningkatan keamanan lalu lintas dan estetika kota merupakan nilai positif dari kebijakan ini, sementara masalah kemacetan dan akses yang terbatas menjadi tantangan yang perlu diatasi. Untuk mencapai solusi terbaik, penting bagi Pemko Medan untuk terus berdialog dengan masyarakat serta melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan berdasarkan umpan balik yang diterima.

#### REFERENSI

- Ahmad, S. N. (2022). Dampak Analisa Anggaran Sebagai Alat Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis [JIMEIS]*, 2(3), 1–9.
- Ardiyanti, D., & Zulian, I. (2018). Korelasi identifikasi Apatisme Politik dengan Kebijakan Publik kota medan. *Jurnal PIR Vol*, 3(1), 29–53.
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif*. RajaGrafindo.
- Dalimunthe, Y. F., & Mardiansyah, M. (2021). Implementasi Standar Operasional Prosedur Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Bidang Perlengkapan dan Pelayanan Pengadaan Pemkot Medan. *INSPIRASI: JURNAL ILMU-ILMU SOSIAL*, 18(1), 452–461.
- Handayani, S. (2023). Penerapan Program Media Relations oleh Bagian Humas dalam Meningkatkan Reputasi Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 3(1), 89–99.
- Harris, A., Sitepu, F. Y., & Andriati, S. L. (2021). Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan sebagai Aset Pemerintah Kota Medan (Sengketa Tanah di Kecamatan Medan Petisah). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 339–351.
- Hidayat, T. W. (2015). Analisis Berita Kesehatan di Media Massa terhadap Pelayanan Publik. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 1(2), 137–153. <https://doi.org/10.31289/SIMBOLLIKA.V1I2.208>
- Ishak, M., & Ramadhan, P. R. (2019). Peran Ketidakpastian Tugas dalam Hubungan Antara Manajemen Pengetahuan dan Kualitas Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 14–25.
- Izharyah, J. R. (2020). Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill. *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH*, 4(2), 117.
- Matondang, E. S., Siregar, M., Nasution, M., & Andriati, S. L. (2024). Analisis Kebijakan Hukum dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 45–64.
- Nasyaa, S. R., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan E-Katalog dan Pemko Medan Terhadap Kesejahteraan. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 313–316.
- Purba, H. S. H., Sinaga, K., & Siregar, F. A. (2022). Peranan Aplikasi E-Kinerja dalam Meningkatkan Produktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemko Medan). *PUBLIK REFORM: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 9(1), 26–33.
- Rahma, V. A., & Sihombing, T. (2023). Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Kota untuk Meningkatkan Keselamatan Penumpang di Kota Medan. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 6(1), 211–218.
- Rambe, R. F., Ritonga, A. R., & Dalimunthe, M. A. (2023). Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan dalam Pengalihan Kewenangan Kebijakan Terkait UU No. 23 Tahun 2014. *Komunika*, 19(01), 39–44.
- Sihaloho, N. T. P. (2022). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 6(1), 161–174.
- Silaban, R. S., Harahap, P. A., Manurung, A. M., & Ivanna, J. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Wali Kota Medan Periode 2020–2024. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2204–2208.
- Siregar, S. R., Wardaya, W., & Tas'an, D. (2017). Implementasi Kebijakan Transportasi Publik dalam Mengatasi kemacetan dan Kepadatan Lalu Lintas di Medan. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 4(2), 147–158.